

# Landasan Filosofis Pengembangan Pendidikan Terpadu Pesantren (Refleksi Hasil Studi Pendidikan Terpadu Pesantren di Jawa Barat)

π **Dr. H. Engking Soewarman Hasan, M.Pd**  
(Universitas Pendidikan Indonesia)

## ABSTRAK

*Sebagai landasan fundamental atau dasar tempat berpijak dalam mengkaji, menelaah bahkan bertindak yang maknawi, aspek filosofis memiliki kedudukan sentral dalam pengembangan pendidikan.*

*Hasil pemikiran (pemikiran filosofis), maupun sebagai proses pemikiran (metode berfikir), filsafat PLS (philosophy of education) dapat memberi kontribusi dalam memahami permasalahan PLS secara menyeluruh, menginterpretasikan, mengarahkan dalam memilih dan menentukan tujuan, serta merumuskan berbagai kebijakan PLS.*

*Dari kajian terhadap aspek yuridis formal (PP 73 tahun 1991), dan aspek historis, pesantren sebagai suatu kelembagaan (institution), kegiatan/proses, bentuk (setting) pendidikan, termasuk pada salah satu bentuk PLS indigeneous, yang berakar pada nilai-nilai agama Islam dan tradisi atau adat istiadat setempat dimana pondok pesantren tersebut berada.*

*Hasil studi lapangan dapat diungkapkan 4 (empat) karakteristik tipologi, khittah perjuangan, idealitas dan nilai (norma) pesantren, ternyata menentukan pemikiran filsafat mana yang menjadi landasan fundasional dalam pengembangan pendidikan terpadu pesantren. Secara substantif pengembangan PLS bersumber pada filsafat idealisme, realisme, pragmatisme, perenialisme dan rekonstruksionisme. Pengembangan pendidikan terpadu pesantren, secara hipotetik lebih bersandar pada pandangan filosofis, pragmatisme, rekonstruksionisme atau rekonstruksi sosial, filsafat Islam dan filsafat pendidikan Islam.*

*Melalui pemahaman dan analisis pemikiran filsafat tersebut, diyakini dapat mencapai visi dan misi pondok pesantren secara optimal dan profesional, terutama dalam pengembangan pendidikan terpadu pesantren.*

**Kata Kunci :** *Landasan, Filosofis, Pengembangan Pendidikan Terpadu, Pesantren, Pendidikan Luar Sekolah .*

Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Pasal 3) menegaskan jenis PLS terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Salah satu bentuk pendidikan keagamaan dan pendidikan kejuruan, secara kelembagaan atau pun proses/kegiatan adalah pesantren. Berdasarkan kajian historis, konseptual-teoritis, maupun filosofis, memberi keyakinan dan semakin menguatkan urgensi PLS sebagai salah

satu bidang kajian keilmuan pendidikan. Dari aspek historis, Djudju Sudjana (2001) menjelaskan bahwa : kegiatan pendidikan, walaupun dalam bentuknya yang paling sederhana, kini dikenal dengan istilah PLS, telah hadir sama tuanya dengan kehadiran manusia yang berinteraksi dengan lingkungan di muka bumi ini. Munculnya berbagai istilah PLS menunjukkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya kegiatan terorganisasi yang dilakukan di sekolah (*in-school education*), namun

hadir dan berkembang pula pendidikan yang terjadi di luar sistem sekolah (*out of school education*).

Secara konseptual-teoritis, berkembang pemahaman PLS sejalan dengan munculnya gagasan pendidikan seumur hidup. Hal ini terbukti dengan semakin intensifnya dilakukan penelitian secara komprehensif oleh berbagai pihak Coombs dkk, (1974, 1977), Russell Kleis, (1974), Suparjo Adi Kusumo (1971), Ahmad Sanusi (1974), Santoso S. Hamijoyo (1974) dalam Sutaryat Trisnamansyah (1984).

Hasil studi tersebut memberi rekomendasi berupa pemahaman PLS, yang intinya bahwa: PLS merupakan upaya pendidikan yang bermakna luas, adanya komunikasi dengan teratur dan terarah, diselenggarakan di luar sistem persekolahan, tujuannya mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai, sehingga seseorang atau kelompok dapat berperan secara efisien dan efektif serta adaptif dan fleksibel dalam kehidupannya, (SEAMEO, 1971). Lebih jauh Sutaryat Trisnamansyah (1984), mengajukan pemahaman PLS dari dua sudut pandang, yaitu: *konsep konvensional* berdasarkan pembiasaan dan pemupukatan dari proses pendidikan, dan *konsep dinamika kesadaran tujuan dalam proses pendidikan*.

Secara praktikal dengan tegas Ace Suryadi, (2001), mengemukakan; PLS merupakan investasi SDM yang dapat menghasilkan angkatan kerja berkualitas untuk menjadi sumber penggerak (*driving force*) Bagi pembangunan bidang-bidang lain. Tak salah, jika dikatakan bahwa PLS adalah “roda gila” pembangunan daerah yang mampu mengerakkan seluruh komponen pembangunan lain.

Dari pemahaman aspek historis dan teoritis diatas, dapat diajukan beberapa karakteristik PLS, sebagaimana dikemukakan oleh O.P. Dahama dan Bhatagar (1980:6) sebagai berikut: “flexible, life-invironment and learner-oriented, diversified in content and method, non-authoritarian, built on learner-participation, mobilises local resources, enriches human and environmental potential”.

Sebelum lebih jauh mengkaji aspek filosofis dalam pengembangan pendidikan terpadu pesantren, permasalahan mendesak yang erat kaitannya dengan kajian ini pertanyaan yang perlu didiskusikan; *dasar pertimbangan apa yang menguatkan pesantren sebagai satuan jenis PLS ?*. Pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui komparasi terhadap aspek historis, konseptual dan karakteristik PLS maupun pesantren.

Secara historis Santoso (1973), Sutaryat (1984), Djudju Sudjana (2001), menegaskan bahwa: PLS berkembang dari pendidikan tradisional (*indigenous*), berakar dalam tradisi dan agama. Ajaran agama (Islam) sebagai materi pendidikan, merupakan unsur motivasi untuk belajar. Nilai-nilai Islam menjadi landasan pengembangan ajaran Islam, yang diselenggarakan di langgar atau pesantren. Pesantren dalam perspektif PLS dapat dipandang sebagai prana/lembaga (*institution*), proses/kegiatan atau satuan jenis PLS (*setting*).

Karakteristik pesantren sebagai salah satu lembaga (*institution*), maupun sebagai kegiatan (*setting*) atau proses dan hasil, dapat diidentifikasi dari hasil penelitian Djamari (1985) maupun Awan Mutakin (1994) sebagai berikut : pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, di sana Kiai sebagai tokoh sentral, dan mesjid sebagai pusat kelembagaan. Ciri khusus pendidikan pesantren; salah satunya adalah metode membelajarkan santrinya. Metode *sorogan* (*mastery learning*) dan *weton* merupakan metode khas di pesantren. Oleh karena itu sangat langka ada istilah santri putus dipesantren.

Engking Soewarman Hasan (1999), berhasil mengidentifikasi karakteristik yang lebih menekankan pada pola pembelajaran di pesantren sebagai berikut: Pesantren Tipe-D; yaitu pesantren yang menyelenggarakan tiga jenis pendidikan secara terpadu; (1) non klasikal, sumber pelajaran yang sering disebut kitab kuning melalui sorogan atau bandungan, (2) klasikal; dimadrasah atau sekolah/perguruan tinggi umum yang bernafaskan agama (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, SMTP,

SMTA, dan perguruan tinggi), (3) keterampilan terpadu seperti; teknologi tepat guna, komputer pertanian, peternakan dan pertokoan.

Diteropong dengan “teleskop” antropologis, pesantren bisa dibaca dalam berbagai aspek sebagai berikut. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga dan sistem pendidikan, pesantren dapat dikategorikan sebagai sub-kultur komunitas santri. Bila dipetakan secara signifikan sebagai madzhab pemikiran keagamaan tradisional, pesantren dipandang mewakili personifikasi wujud sinkretisme Islam yang universal dengan budaya lokal Indonesia yang partikular dan tidak salah apabila dianggap sebagai representasi dari kepentingan masyarakat bawah, menarik dan selalu segar diperbincangkan. (Marzuki Wahid, 1999:145-147).

Sesuai dengan maksud penulisan ini, pembahasan selanjutnya difokuskan pada kajian filosofis dan teoritik pengembangan pendidikan terpadu pesantren, serta aplikasi filosofis dan teoritik dalam pengembangan pendidikan terpadu pesantren di Jawa Barat.

### **Kajian Filosofis Dan Teoritik**

Beberapa ahli memberikan gambaran dasar bagi landasan fundasional PLS, seperti Gordon Darkenwald, (1982), Sahakian (1972), Hal Beder (1972), Ozmon Craver (1981), Djudju Sudjana (1991), John Elias, S.Merriam, (1980), (dalam Mustafa Kamil, 2002). Pada intinya pandangan para ahli tersebut mengisyaratkan bahwa eksistensi dan pentingnya PLS secara fundasional memiliki konsep dasar yang mengacu pada filsafat pendidikan, atau aliran filsafat lainnya.

Secara umum Uyoh Saduloh (2001) mengembangkan konsepsi yang ditawarkan M.I Soelaeman, mengajukan empat pendekatan dalam mengembangkan dan menetapkan landasan fundasional pendidikan, yaitu: pendekatan filosofis, pendekatan ilmiah, pendekatan fenomenologi dan pendekatan religi.

Sekaitan dengan hal ini terdapat beberapa pemahaman, Djudju Sudjana (2001) menetapkan

tiga pemikiran filosofis yang menjadi landasan pengembangan PLS, yaitu : filsafat idealisme, filsafat realisme dan filsafat pragmatisme. Dalam pemahaman yang lebih luas Ishak Abdulhak (2002) mengajukan beberapa aliran filsafat PLS yang dipandang paling dominan saat ini, yaitu: aliran liberal, aliran progresif, aliran behavioral, aliran humanistik, aliran radikal dan aliran analitik. Sutaryat Trisnamansyah lebih menguatkan pada filsafat perenialisme dan rekonstruksionisme. Dalam hubungannya dengan pengembangan pendidikan terpadu pesantren, diajukan pandangan filsafat pragmatisme, rekonstruksionisme atau rekonstruksi sosial, filsafat Islam dan filsafat pendidikan Islam.

*Filsafat pragmatisme*, lebih mengarah pada pengetahuan tentang kenyataan itu ialah sepanjang dialami manusia melalui alat dria. Oleh karena itu ilmu pengetahuan, bahkan agama, banyak mempengaruhi aliran ini. tema-tema pokok yang diulik aliran pragmatis diantaranya adalah: 1) kenyataan tentang adanya perubahan, 2) hakekat manusia sebagai mahluk biologis dan mahluk sosial, 3) kerelatifan nilai-nilai, dan 4) penggunaan manusia untuk belajar bertindak secara kritis. Mengacu pada topik-topik tersebut diatas, maka PLS dalam menetapkan tujuan dan kegiatannya perlu disusun secara terbuka dan fleksible, dalam arti terbuka terhadap perbaikan dan perubahan. Demikian pula tujuan dan kegiatan pendidikan hendaknya disusun secara rasional dan ilmiah. Disamping itu, aliran pragmatis percaya bahwa manusia pada sadarnya dapat berubah dengan luwes.

Hal lain yang dapat dijadikan acuan mengapa pragmatisme dipandang sebagai dasar filsafat PLS, karena aliran ini berpandangan bahwa pendidikan bukan merupakan suatu proses pembentukan dari luar, dan juga bukan merupakan suatu pemerlahan kekuatan-kekuatan laten dengan sendirinya (*unfolding*). Oleh karena itu pendidikan menurut pragmatisme merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman individu. Sehingga pandangan ini menekankan bahwa

baik anak maupun orang dewasa selalu belajar dari pengalaman. (John Dewey 1964 ; 76). *The idea of growth results in conception that education is a constant reorganizing or reconstructing of experience. It has all the time an immediately end, the direct transformation of the quality of experience.* Ada tiga cacatan pokok dari John Dewey yang sangat berkaitan erat dengan prinsip belajar dalam PLS adalah : 1) pendidikan merupakan kebutuhan untuk hidup (*learning to be*) 2) pendidikan sebagai pertumbuhan, 3) pendidikan sebagai fungsi sosial. (*Education is the fundamental method of social progress*) (Ozmon Craver, 1981: 111) dalam Mustafa Kamil (2001).

Watak pragmatisme adalah humanistik dan menyetujui suatu dalil “*manusia adalah ukuran segala-galanya*” (*man is the measure of all things*). Tujuan dan alat pendidikan harus fleksibel dan terbuka untuk perbaikan secara terus-menerus. Tujuan dan cara untuk mencapai tujuan pendidikan harus rasional dan ilmiah.

Power (1982) dalam Uyoh Saduloh (1994) mengemukakan implikasi pendidikan pragmatisme terhadap pendidikan, sebagai berikut: 1) *Tujuan pendidikan*; Memberi pengalaman untuk penemuan hal-hal yang baru dalam hidup sosial dan pribadi, 2) *Kedudukan Siswa*; Suatu organisme yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh, 3) *Kurikulum*; Berisi pengalaman yang teruji dan dapat diubah, 4) *Metode*; Metode aktif, yaitu, *learning by doing* (belajar sambil bekerja), 5) *Peranan guru*; Mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa, tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya.

*Filsafat rekonstruksionisme atau kons-truksi sosial* bertitik tolak dari filsafat progresivisme yang dilandasi pemikiran pragmatisme Dewey, dikembangkan oleh Kilpatrick dan John Child juga mendorong pendidikan agar lebih sadar terhadap tanggung jawab sosial. (Uyoh Saduloh, 1994). Tujuan pendidikan filsafat rekonstruksi sosial, menumbuhkan kesadaran terdidik yang terkait dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi manusia dalam skala global,

dan memberi keterampilan kepada mereka agar memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Tujuan akhir pendidikan adalah terciptanya masyarakat baru, yaitu sesuatu masyarakat global yang saling ketergantungan. Kurikulum merupakan *subject matter* yang berisikan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik yang beraneka ragam, yang dihadapi umat manusia, termasuk masalah-masalah sosial pribadi terdidik itu sendiri.

Teori pendidikan rekonstruksionisme yang dikemukakan oleh Brameld (Kneller, 1971) dalam Uyoh Saduloh (1994) terdiri atas lima tesis, yaitu: 1) Pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya kita, dan selaras dengan yang mendasari kekuatan-kekuatan ekonomi, dan sosial masyarakat modern, 2) Masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati, di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri, 3) Anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Menurut rekonstruksionisme, hidup berada adalah hidup berkelompok, sehingga kelompok akan memainkan peran yang penting di sekolah, 4) Guru harus meyakinkan terhadap *validitas* dan *urgensi* dirinya dengan cara bijaksana dengan cara memperhatikan produser yang demokratis.

Penikiran filosofis lainnya yang tak bisa dipisahkan dalam pengembangan pendidikan terpadu pesantren adalah filsafat pendidikan Islam dan filsafat Islam. Filsafat pendidikan Islam memberikan pandangan obyektif yang mendasar tentang kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Apalagi bila ditinjau dari ajaran Islam, di mana kemampuan dalam segala bidang kehidupan harus dikuasai. Maka filsafat pendidikan Islam berusaha menunjukkan arah kemana pendidikan Islam harus ditujukan. Dan pandangan demikian baru fungsional bila diprogramkan dalam proses kependidikan. (Arifin, H.M., 1989 : 44-45)

Filsafat Islam tidaklah semata-mata bersifat rasional, yang hanya bersandar pada analisis logis,

terhadap suatu peristiwa, tetapi juga jejak spiritual untuk memasuki dimensi kegaiban. Rasionalitas filsafat Islam, terletak pada kemampuannya menggunakan potensi berfikir secara bebas, radikal dan berada pada dataran makna, menganalisis fakta-fakta empirik dari suatu kejadian, dalam bangunan sistem pengetahuan yang ilmiah. Sedangkan transendensinya terletak pada kesanggupan mendayagunakan qalb, intuisi imajinatif, untuk menembus dan menyatu, dalam kebenaran gaib secara langsung, dan menjadi saksi kehadiran Allah dalam realitas kehidupan. (Asy'arie, Musa., 2001 : 8)

Secara teoritis andragogi merupakan salah satu alternatif konsep yang semakin menguat dalam kaitannya dengan pengembangan PLS. Hal ini akan semakin dapat dipahami terutama apabila pemahaman PLS dikembangkan dari kajian sasaran kelompok masyarakat, dan konsep pendidikan yang menekankan pada proses pendewasaan masyarakat dalam konteks luar.

Dalam kaitannya pemahaman tentang andragogi dan pedagogi harus dipahami sebagai suatu garis kontinum. Srinivasan (1977 : 13) mengemukakan, didalam pembelajaran teori andragogi menggabungkan elemen psikologi humanistik dengan pendekatan sistem. Pembelajaran akan lebih bermakna juga melibatkan warga belajarnya sepenuhnya dan menekankan penerahan diri sendiri (self-directed).

Lebih lanjut Knowless (1977 : 44), menegaskan bahwa pembelajaran akan berhasil dengan baik jika melibatkan baik fisik maupun mental emosionalnya. Karena itu, pelaksanaan pembelajaran yang bersifat andragogi sebaiknya mengikuti langkah-langkah : (1) menciptakan iklim belajar yang cocok untuk orang dewasa, (2) menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif, (3) mendiagnosa kebutuhan belajar, (4) merumuskan tujuan belajar, (5) mengembangkan rencana kegiatan belajar, (6) melaksanakan kegiatan belajar, (7) mendiagnosa kembali kebutuhan belajar (evaluasi) dan mereka diperlakukan sebagai teman belajar bukan seperti kedudukan antara siswa dengan guru. Melibat-

kan warga belajar di dalam pembelajaran orang dewasa dilandasi oleh empat asumsi : 1) konsep diri, 2) Pengalaman, 3) kesiapan belajar, 4) orientasi belajar.

Proses pemberdayaan atau "Empowering process" merupakan inti dari pembelajaran dalam PLS. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Satu paradigma baru pembangunan yang bersifat "people centered, participatory, empowering and sustainable" (Chambers 1995) mencari "alternative development" yang menghendaki "inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and inter generational equity" (Friedmann, 1992) dalam Engking Soewarman Hasan (2001).

Dalam proses pemberdayaan, terjadi pula penanaman nilai-nilai budaya maju; seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan kebertanggung jawaban. Torre (1985) menyimpulkan mengenai pemberdayaan, adalah "A process through which people because strong enough to participate within share in the control of, and influence events and institution affecting their lives, (and that in part), empowerment necessitates that people gain particular skills, knowledge, and sufficient power to influence their lives and the lives those they care about" (Parsons, 1994) dalam Engking Soewarman Hasan (2001).

Kindervatter (1979) menyimpulkan pemberdayaan dalam kaitannya dengan PLS sebagai berikut : Non Formal Education for Empowerment is an approach which enable learner to gain greater understanding of and control over social, economic, and/or political forces through: (1) exercising a high degree of control over all aspects of the learning process, (2) learning both content and process skill responsive to their needs to and problems, and (3) working collaboratively to solve mutual problems.

## Aplikasi

Filosofi PLS, seperti halnya sistem pemikiran pada umumnya, bersumber pada konteks sosio-kultur tertentu. Oleh karena itu, pandangannya

menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan. Logikanya, ketika kita mengembangkan program PLS tertentu akan lebih cocok dengan filosofi tertentu, mungkin tidak cocok dengan pandangan lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan PLS yang sinergi dan mendorong warga belajar untuk belajar berkelanjutan dalam kehidupannya, merupakan prinsip yang harus dianut para penyelenggara, aliran apapun filosofi dasarnya.

Dari kajian lapangan (Engking Soewarman Hasan, 2001) dapat diungkapkan empat tipologi pesantren sebagai berikut : a) Pesantren Tipe A, yaitu para santri belajar dan bertempat tinggal bersama-sama kyai. Rancangan kegiatan pembelajaran terserah kepada kyai, cara menyampaikan pelajaran individual (sorogan kitab kuning) dan kelompok (bandungan kitab kuning), tidak menyelenggarakan madrasah, b) pesantren tipe B, yaitu membina pelajaran individual dan kelompok (pengajian kitab kuning), tetapi sudah mempunyai madrasah untuk belajar para santri, kurikulum dibakukan, pengajaran agama di madrasah dari kyai merupakan studium general sesuai dengan kurikulum madrasah yang didirikan, c) Pesantren tipe-C, merupakan tempat tinggal (pondok) para santri yang belajar dimadrasah-madrasah atau sekolah-sekolah/perguruan tinggi. Pengajian kitab-kitab kuning kurang mengikat, fungsi kyai tetap sebagai pengayom pembina ajaran Islam, d) Pesantren Tipe-D, menyelenggarakan tiga jenis pendidikan secara terpadu; (1) non klasikal, sumber pelajaran yang sering disebut kitab kuning melalui sorogan atau bandungan, (2) klasikal; dimadrasah atau sekolah/perguruan tinggi umum yang bernafaskan agama, (3) keterampilan terpadu seperti; teknologi tepat guna, komputer pertanian, peternakan dan pertokoan.

Temuan data dan informasi Djamari (1986), Engking Soewarman Hasan (1999) menunjukkan bahwa sekalipun nampak aneka ragam pengelolaan lebih kurang 7000 pesantren di Indonesia, namun pendidikan di Pesantren masih memiliki kesamaan khittah perjuangan, dengan ciri-ciri khusus sebagai berikut; a) *Keakraban hubungan yang dijalin;*

antara santri dengan kyai, b) *sikap hidup hemat dan sederhana,* c) *semangat menolong diri sendiri;* dan mencintai diri sendiri tampak dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemandirian merupakan nilai yang dijunjung tinggi, d) *berjiwa dan bersemangat tolong menolong,* kesetiakawanan sosial dalam suasana kebersamaan, persaudaraan, e) *sikap disiplin taat waktu dan peraturan,* f) *berani menderita,* untuk mencapai satu tujuan pendidikan pesantren, g) *bersikap jujur,* kesemuanya itu dilandasi dengan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Idealitas pesantren diletakkan dalam empat H, yaitu : a) *Head;* mendidik santri dengan tauhid dan ilmu pengetahuan agar menjadi manusia yang bukan hanya pandai, tetapi sekaligus menjadi *manusia yang kaffah,* b) *Heart;* mendidik santri dengan iman dan akhlak mulia sehingga ia akan memiliki ketangguhan, keberanian untuk membela kebenaran, c) *Hand;* mendidik santri dengan seni dan olah jiwa raga, sehingga ia akan menjadi orang yang mencintai keindahan, dapat menghayati nilai-nilai estetika dan memiliki *ketahanan fisik yang prima,* d) *Health;* membudayakan hidup bersih, sehat, tertib dan disiplin.

Hasil kajian penelitian (Engking Soewarman Hasan, 2001) mengungkapkan karakteristik sosial budaya pesantren sebagai berikut: a) pandangan mengenai anak, b) harapan terhadap anak cukup tinggi, diharapkan anak menjadi anak soleh, bisa mandiri dan bahkan menjadi pemimpin dimasa depan, c) masalah kemandirian dan produktivitas, d) warga masyarakat memandang bahwa pesantren memiliki nilai plus dibandingkan dengan sekolah umum, e) tata laku dalam kehidupan masyarakat sekitar maupun dari dalam pesantren, tidak perlu ada pernyataan secara formal. f) mengenai nilai kehidupan beragama, bahwa agama merupakan pedoman dan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan, g) ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan suatu yang tidak bisa dilepaskan dari agama, h) pandangan mengenai nilai-nilai ekonomi, menyandarkan bahwa ekonomi merupakan basis perjuangan sehingga santri harus melek ekonomi.

Nilai-nilai ekonomi sebagai salah satu landasan dalam pengembangan pendidikan keterampilan, ternyata memiliki karakteristik tersendiri. Proses internalisasi nilai-nilai ekonomi di pesantren tidak terlepas dari adanya pengaruh eksternal baik sebagai nilai-nilai ekonomi eksternal wilayah atau lingkungan sekitar pesantren.

Dari sejumlah pemikiran filosofis PLS sebagaimana diungkapkan di atas, dikaitkan dengan nilai-nilai fundamental yang dipandang sebagai faktor determinatif dalam pengembangan pendidikan terpadu pesantren dapat ditegaskan secara hipotetik bahwa pendekatan dan pemikiran filsafat yang dapat dijadikan landasan fundamen dalam pengembangan pendidikan terpadu pesantren, antara lain : filsafat pragmatisme, filsafat rekonstruksionalisme atau rekonstruksi sosial, filsafat pendidikan Islam dan filsafat Islam.

Secara lebih implementatif, pemikiran-pemikiran filsafat di atas selanjutnya dapat dituangkan dalam kajian mengenai: kelembagaan pesantren, arah keterpaduan, tujuan keterpaduan dan ruang lingkup keterpaduan sistem pendidikan pesantren.

Penerapan sistem pendidikan terpadu antara pendidikan sekolah dan PLS tampak bukan sekedar keterpaduan dalam tempat penyelenggaraan pendidikan saja, tetapi menyangkut komponen-komponen bahkan sampai kepada unsur-unsur dalam keterpaduan. Dalam implemenyasinya keterpaduan bukan hanya sekedar proses pencampuran, akan tetapi proses pelarutan materi/isi sistem secara keseluruhan.

Sebagai salah satu contoh kasus, keterpaduan tujuan pendidikan sekolah dan PLS dalam pendidikan di Pesantren Darussalam, dirancang dan dirumuskan sedemikian rupa oleh pengelolanya, bukan saja memadukan antara pencapaian tujuan ber-IMTAQ dan ber-IPTEK tetapi juga tujuan agar para lulusannya hidup mandiri, Didasari upaya pencapaian tujuan dan dengan disertai landasan idealitas pesntren.

Pengalaman belajar bagi peserta didik/warga belajar disajikan secara:

(a) Klasikal yang

dilakukan di pendidikan sekolah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan IAID). Keterpaduan materi tampak dalam mata pelajaran umum yang didalamnya dikaitkan dengan ajaran agama, (b) Non-Klasikal yang dilakukan di pondok pesantren sebagai lembaga PLS, dimana materi dari “Kitab Kuning” melalui sorogan dan bandungan, (c) Keterampilan fungsional seperti komputer, perbengkelan, elektronika, pertanian, peternakan dan perikanan. Atas dasar itu, pengembangan model pendidikan keterampilan, secara teoritis kurikulumnya dikembangkan dengan pengembangan prinsip pengembangan kurikulum terpadu (*Integreted and corellated curriculum atau Broad-Field*).

Istilah kampus pendidikan merujuk kepada suatu lingkungan wilayah dimana lay-out didesain sedemikian rupa dengan bangunan gedung, peralatan, dan sarana prasarana yang cocok dan favourable bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren sebagai kampus pendidikan terpadu yang didalamnya menyajikan keterpaduan pendidikan sekolah (Madrasah dan IAID) dan PLS (pendidikan keterampilan fungsional), diselenggarakan seiring sejalan dengan ciri sentral mesjid sebagai pusat kegiatan beribadah.

## Diskusi

Pesantren sebagai lembaga PLS yang ber-sumber dan sangat diwarnai dengan nilai-nilai agama, telah mengalami perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan sistem pendidikannya. Salah satu sistem pendidikan yang menjadi arah (trend) pengembangan saat ini, yaitu sistem pendidikan terpadu pesantren. Sistem pendidikan ini tampaknya merupakan reaksi terhadap berbagai kelemahan dua sistem pendidikan yang ada, yaitu kelemahan-kelemahan sekolah dan kelemahan-kelemahan pesantren sebagai bentuk PLS.

Hasil kajian empiris (Engking Soewarman Hasan, 2001), menunjukkan kecenderungan bahwa eksistensi dan urgensi sistem pendidikan terpadu pesantren memberi kontribusi positif terhadap

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menjadi dasar pentingnya kajian secara filosofis dalam upaya pengembangan pendidikan terpadu pesantren dengan asumsi bahwa kajian fundasional ini dapat menguatkan arah pengembangan itu sendiri. Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu upaya pembinaan peserta didik (warga belajar) untuk menjadi manusia yang berkualitas. Keterpaduan sistem yang sinergik integratif, keterpaduan antar jalur dan jenis pendidikan, juga keterpaduan antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Di dalam proses keterpaduan itu terjadi interaksi internal dan interaksi eksternal.

Keterpaduan sistem pendidikan pesantren, penyelenggaranya memadukan kurikulum secara berjenjang dan terpadu antara kurikulum pesantren dengan jenis-jenis kitab kuning dan kurikulum Madrasah dan pendidikan keterampilan. Ciri utama dalam menyelenggarakan pendidikan keterampilan didasarkan atas minat dan kebutuhan santri, baik santri yang junior dan santri yang senior dengan menerapkan sistem magang, pelatihan dan belajar berusaha. Khusus bagi santri, baik junior maupun senior menamatkan pendidikan Madrasah Aliyah ke atas, secara berkelanjutan (*sustainable*) disiapkan mengikuti program Ma'had Aly.

Pemisahan pendidikan, baik secara penuh dengan membentuk sistem perguruan tersendiri, maupun dalam bentuk pembagian porsi materi pendidikan agama dan umum. Hal ini sesungguhnya masih tetap mengandung pandangan yang dikhotomis sifatnya. Perpaduan ini semestinya terjadi sebagai "proses pelarutan" dan bukan sekedar "proses pencampuran biasa".

Hasil penelitian Engking Soewarman Hasan (2001) berhasil mengungkapkan jenis-jenis pendidikan keterampilan yaitu; komputer' pertanian (bio kantata), peternakan dan pertokoan. Dasar pertimbangan ditetapkannya ke-4 pendidikan keterampilan tersebut secara empiris yaitu karakteristiknya yang adaptif dengan kondisi santri, potensi sebagaimana pendukung terselenggaranya pendidikan keterampilan, ketersediaan sumber

belajar untuk pembelajaran dan penerapannya bagi kehidupan para santri dimasa yang akan datang. Bahkan secara teoritis penetapan jenis keterampilan tersebut serta kaitannya dengan konsep "*link and match*". Oleh karena itu perlu diwujudkan pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran yang memiliki kemampuan, keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan, baik untuk bekerja maupun untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya (Wardiman dan Ace Suryadi, 1996)

Filosofi pendidikan diharapkan dapat mengarahkan kepada perumusan pendidikan yang relevan. Adapun diantara teori-teori pendidikan yang ada, teori Social-Reconstructivisme kiranya cukup tepat-dengan modifikasi-modifikasi-untuk menjawab kebutuhan bangsa Indonesia yang sedang memperbaiki, membenahi, dan mereformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani-masyarakat Indonesia baru-yaitu masyarakat yang Pancasila yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tertib dan dan sadar hukum, percaya diri dan kreatif, serta memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif yang penuh rasa persaudaraan.

Dalam teori Social-Reconstructivisme dikembangkan filosofi kebijakan sosial (*Social policy*) untuk menggantikan filosofi kebijaksanaan publik (*Public policy*). Apabila filosofi kebijaksanaan publik itu diberangkatkan dari pengakuan otoritas pemerintah untuk menetapkan alternatif pilihan *action* bagi kepentingan publik, bagi kepentingan rata-rata masyarakat, maka filosofi kebijaksanaan sosial diberangkatkan dari pengakuan kita bahwa siapapun memiliki hak dalam bidang dan tingkat kewenangan masing-masing untuk menentukan arah dan mutu pendidikan nasional Indonesia. Pengakuan atas otoritas masing-masing dalam bidang dan tingkat kewenangan seperti ini juga menjadi salah satu ciri esensial dari masyarakat madani yang didambakan.

Teori ini memberi dukungan terhadap implementasi desentralisasi dan demokratisasi sistem



pendidikan nasional. Sebagai konsekuensi logisnya bahwa institusi pendidikan (baca: sekolah atau kampus) diharapkan mampu memegang peranan yang strategis sebagai agen perubahan dan pembaharuan masyarakat menuju masyarakat madani (*civil society*) yang lebih menekankan pada pengakuan terhadap eksistensi rakyat dan pemberdayaan rakyat, sehingga rakyat Indonesia memiliki kedaulatan penuh, sebagai partisipan dalam upaya rekonstruksi masyarakat yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, dan sebagai institusi yang memiliki komitmen dengan isu-isu kesejahteraan global. Akhirnya teori ini diharapkan dapat menjamin kelangsungan sistem pendidikan, proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengutamakan transaksi antar personal yang dialogis dan edukatif. (Nurhadi A.M. dkk; 1999:14).

Pandangan Al Farabi dan Ibnu Sina juga para ahli didik Ikhwanussofa, menegaskan bahwa kesempurnaan manusia itu tidak akan tercapai kecuali dengan mensesuaikan antara Agama dan ilmu pengetahuan. Pandangan tersebut tidak bertentangan dengan pemikiran para ahli pikir pendidikan di Barat yang berpaham idealisme. Bahkan bagi kaum idealis, seperti John S. Brubacher, memandang bahwa tolok ukur bagi efektivitas suatu nilai dari sistem pendidikan yang diterapkan adalah pada *corak kepribadian* seseorang sebagai sasaran pokok proses kependidikan; Nilai-nilai tersebut membentuk karakter (watak) yang berkeadilan sosial, *keterampilan* (skill), kemampuan menciptakan seni, memiliki perasaan cinta kasih, berilmu pengetahuan, bernilai filsafat dan Agama. (Arifin, M.H, 1996 : 186).

Sekaitan dengan aspek filosofis ini Sanusi. A. (1998 : 7) menegaskan, “ini jelas rujukan teorinya, dan tepat pula cara-cara analisisnya”, atau “kekuatannya terletak bukan saja pada data pendukungnya yang relevan dan akurat, melainkan pula pada pertanggungjawaban filosofisnya”.

Pendidikan keterampilan terpadu dalam rangka pemberdayaan santri; memperhatikan 3

unsur, yaitu: 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi santri berkembang. Dalam kaitan ini perlu dipahami bahwa setiap manusia memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan berarti upaya untuk membangkitkan daya itu dengan memotivasi potensi yang dimiliki santri agar berupaya untuk mengembangkannya, 2) Memperkuat potensi atau daya (empowering) yang dimiliki santri dengan penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan kesempatan kepada berbagai peluang dan sekaligus untuk mampu memanfaatkan peluang itu, dan 3) Memberdayakan mengandung pula pengertian melindungi. Artinya dalam proses pemberdayaan para santri harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Dari kajian pemberdayaan di atas ada tiga langkah yang perlu diperhatikan : (1) upaya pembinaan sosial ekonomi individu santri (2) terwujudnya transformasi struktur sosial ekonomi secara bertahap meningkat dan (3) pengembangan kelembagaan pesantren (*institutional development*) melalui pemberdayaan itu sendiri, kalau perlu dengan mengadakan revitalisasi, reformasi dan transformasi.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan santri untuk maju dan mandiri : 1) Prinsip keberpihakan yaitu mengutamakan yang terbaik, 2) Prinsip penguatan (empowering) atas berbagai peluang kesempatan yang dimiliki, 3) Prinsip santri sebagai pelaku dan orang luar sebagai fasilitator, 4) Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan-perbedaan, 5) Prinsip informal, bersifat luwes, terbuka, dan tidak memaksa, 6) Prinsip mengoptimalkan hasil informasi antar santri dan menyerap berbagai informasi, tanggapan masyarakat, 7) Prinsip orientasi praktis yaitu pengembangan kegiatan bersama, 8) Prinsip keberlanjutan dan selang waktu. Pemberdayaan bukan suatu usaha yang final tetapi merupakan kegiatan yang berlanjut, 9) Prinsip belajar dari kesalahan dan kekurangan, sebab kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan pemberdayaan sesuatu yang wajar, dan 10) Prinsip

terbuka (transparancy); setiap kegiatan terbuka sehingga tiap santri peserta ikut bertanggung jawab kemungkinan atas kegagalan dan ikut menikmati atas keberhasilannya.

## Daftar Pustaka

- Abdulhak, I. (2002), *Filosofi Pendidikan Non Formal, Bandung* : Makalah Pada Seminar CNSP.
- Arifin, M.H. (1996), *Ilmu Pendidikan Islam (Suatu Pendekatan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner)*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Asyarie, M. (2001) : *Filsafat Islam (Sunnah Nabi Dalam Berfikir)*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Dahama, O.P.& Bhatnagar, O.P. (1980), *Education And Communication For Development*, New Delhi India.: Oxford & Ibh Publishing Co.
- Djamari, (1985), *Nilai-Nilai Agama dan Budaya Yang Melandasi Interaksi Sosial di Pondok Pesantren Cikadueun Banten (Disertasi)*, Bandung : Fakultas Pasca Sarjana IKIP Bandung.
- Hasan, S.E. (2001), *Pengembangan Model Pendidikan Keterampilan Dalam Sistem Pendidikan Terpadu Pesantren Sebagai Proses Pemberdayaan Santri (Disertasi)*, Bandung : Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- (1999) : *Kajian Keterpaduan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dengan Pendidikan Luar Sekolah Di Pesantren Darussalam, Ciamis, Jawa Barat (Tesis)*, Bandung : Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Hamijoyo, S.S. (1973) : *Pengertian, Falsafah, Dan Azas Pendidikan Non-Formal*, Jakarta : Depdikbud.
- Kamil, M. (2001), *Landasan Filosofis Keilmuan Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung : Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UPI.
- Kindervatter, S. (1979), *Non-Formal Education as an Empowering Process*, Amherst : Center For International Education.
- Mutakin, A. (1994), *Keberadaan Pesantren Darul Hikan Kiangroke Dalam Transformasi Nilai (Disertasi)*, Bandung : Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Mudyahardjo, R. (1998), *Filsafat Ilmu Pendidikan Dan Pengembangan Fakultas Ilmu Pendidikan*, Bandung : Jurusan Filsafat Dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung.
- Nurhadi, A.M. dkk, (1999), *Filosofi, Kebijakan, dan Strategi Pendidikan Nasional*, Jakarta : Depdikbud.
- Nurdin, M. dkk (1995), *Moral Dan Kognisi Islam*, Bandung : Alfabeta.
- Saduloh, U (1994), *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung : Media Iptek.
- (2001), *Pendekatan Dalam Pengembangan Keilmuan*, Bandung: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UPI.
- Sanusi, A. (1998), *Filsafah Ilmu, Teori Keilmuan, Dan Metode Penelitian*, Bandung : Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Siradj, A.S. (1999), *Pesantren Masa Depan (Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren)*, Bandung : Pustaka Hidayah.
- Srinivasan, L. (1977), *Perspektive on Non-Formal Adult Learning*, New York: World Education.
- Sudjana, D. (2001), *Pendidikan Luar Sekolah (Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung Dan Asas)*, Bandung : Falah Production.
- Suriasumantri, S.J. (1996), *Filsafat Ilmu (Sebuah Pengantar Populer)*, Bandung: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadi, A. (2001), *Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Sumber Penggerak Perekonomian Daerah*, Bandung : Makalah Tahunan Sentra Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Trisnamansyah, S. (1984), *Pengaruh Motif Berafiliasi, Keterbukaan Berkomunikasi, Persepsi Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Modern Petani (Disertasi)*, Bandung : Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung.
- (1986), *Pendidikan Kemasyarakatan*, Bandung : Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung.
- Wahid, M., dkk., (1999), *Pesantren Masa Depan (Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren)*, Bandung : Pustaka Hidayah.